

Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master La... English View Site nengah_suriata

Submission Library View Metadata

Pola Pengawasan Gubernur dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Daerah
I Nengah Suriata

Submission Review Copyediting Production

Submission Files Search

386763-1	nengah_suriata, Author, JMHU I Nengah Suriata Mendeley Vers.doc	Article Text
396045-1	suksma, Journal manager, REVIEW JMHU-Pola Pengawasan Gubernur dalam Otonomi Daerah Kabupaten:Kota guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Daerah .dot	Article Text

Download All Files

PRE-REVIEW X

Participants

Made Suksma Prijandhini Devi Salain (suksma)
I Nengah Suriata (nengah_suriata)

Messages

Note	From
<p>Yth.penulis,</p> <p>terima kasih telah submitted artikel anda pada Jurnal Magister Hukum Udayana, berkaitan dengan artikel anda silahkan lakukan turnitin mandiri pada artikel anda dengan indeks maksimal 20%</p> <p>upload kembali artikel anda dengan membalas pesan ini.</p> <p>Hormat Kami,</p> <p>Editor Journal</p>	<p>suksma Dec 15</p>

Notifications X

[jmhu] Editor Decision

2023-12-17 01:16 PM

I Nengah Suriata:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), " Pola Pengawasan Gubernur dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Daerah".

Our decision is to: Request revision to the author.

Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Fakultas Hukum universitas Udayana
devi_salain@unud.ac.id

Reviewer's Attachments Search

396251-1	Reviewer, review pola pengaturan.docx
----------	---------------------------------------

Pola Pengawasan Gubernur dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Daerah

Microsoft Office User
OK
December 17, 2023, 8:33 PM

dan Kota, Mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Corresponding Author:
I Nengah Suriata, E-mail:
nengahsuriata1@gmail.com

Corresponding Author:
I Nengah Suriata, E-mail:
nengahsuriata1@gmail.com

DOI:

tentang Pemerintahan Daerah. Manfaat penelitian untuk menemukan pola pengawasan Gubernur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode Penelitian yaitu, jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan

konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Supervisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam

Microsoft Office User
TUJUAN
December 17, 2023, 8:33 PM

Microsoft Office User
Metode penelitian yang digunakan adalah...
December 17, 2023, 8:34 PM

Microsoft Office User
PERHATIKAN SPASI KESELURUHAN ARTIKEL ADALAH 1.0
December 17, 2023, 8:34 PM

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widyawati, menyebutkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, atas dasar negara Negara Kesatuan baik pengawasan preventif dan represif. Sirajuddin, dkk pengawasan, proses mencapai tujuan sesuai tolok ukur yang ditetapkan, sesuai asal 378 ayat (1) UU 23/2014, Gubernur melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.⁸ Pasal 373 ayat (2) UU 23/2014 dinyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Syaukani HR, menyebutkan, otonomi daerah untuk pemerataan pembangunan. Ketidakejahteraan rakyat di daerah dan tidak mencerminkan rasa keadilan rakyat di daerah akan berdampak disorientasi bangsa bahkan disintegrasi yang mengancam kehidupan nasional dalam negara kesatuan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan UU 23/2014.

RUTR melalui proses evaluasi, pembatalan Perda Provinsi kabupaten/kotamenjadi kewenangan Presiden melalui Perpres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pola Pengaturan Pengawasan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan atas uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan

Pola Pengaturan Pengawasan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU 23/2014 dalam konsideran menimbang bahwa ...penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Dalam UU 23/2014, Pasal 1 angka 8 Desentralisasi melahirkan adanya otonomi daerah, bahwa desentralisasi sebagai penyerahan urusan

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Amaluddin, Zainal, and Erjan Saputra. "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *AL-SULTHANIYAH* 10, no. 1 (2021): 60-75.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer. 2007.

Revisions Search Upload File

398181-1 Author, REVISION NENGAH SURIATA.docx Article Text

Notifications ✕

[jmhu] Editor Decision

2023-12-28 12:43 AM

I Nengah Suriata:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), " Pola Pengawasan Gubernur dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Daerah".

Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Fakultas Hukum universitas Udayana
devi_salain@unud.ac.id

Tasks 0

Submissions

Pola Pengawasan Gubernur dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Daerah I Nengah Suriata

[Submission](#) [Review](#) [Copyediting](#) [Production](#)

Copyediting Discussions

[Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
SURAT PERNYATAAN ETIKA	suksma Dec/28	nengah_suriata Dec/28	1	<input type="checkbox"/>

Notifications



[jmhu] Editor Decision

2023-12-29 04:12 AM

I Nengah Suriata:

The editing of your submission, " Pola Pengawasan Gubernur dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Daerah," is complete. We are now sending it to production.

Submission URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/authorDashboard/submission/108524>

Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Fakultas Hukum universitas Udayana
devi_salain@unud.ac.id